

Berdasarkan **Pasal 4 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004** – RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya **pemerintahan Negara Indonesia** yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dalam bentuk **visi, misi, dan arah pembangunan nasional**.

RPJPN
2005-2025



RPJPN
2025-2045



Indonesia
Emas 20
45

Penyusunan BS RPJPN 2025-2045 Bidang Politik dan Komunikasi sebagai skenario jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 yang memuat rancangan **arah, sasaran, dan strategi** pembangunan nasional yang meliputi pembangunan **kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, komunikasi dan media**.



Kelembagaan Demokrasi



Wawasan Kebangsaan

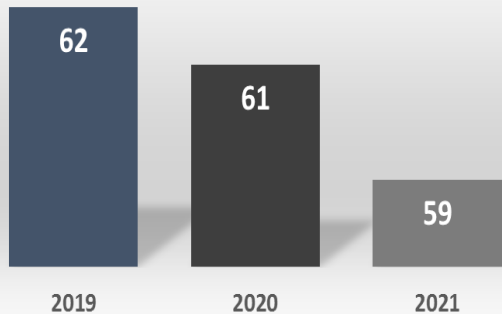


Komunikasi Publik dan Media



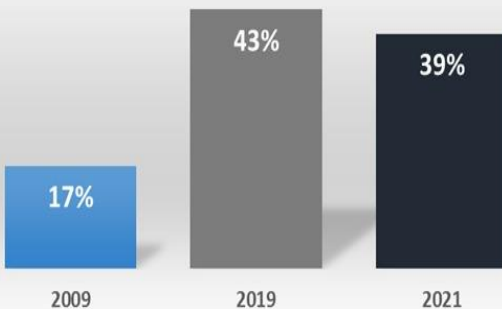
- Demokrasi Indonesia mengalami dinamika pada paruh kedua reformasi – Indeks FH dan EIU

Skor Kebebasan



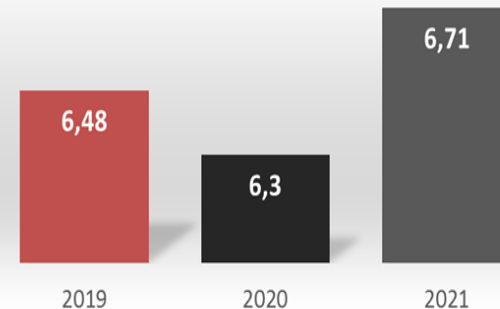
Dalam 3 tahun terakhir skor Indonesia turun, dan mencapai poin terendah pada 2021 – *Freedom House*

Takut Bicara Politik



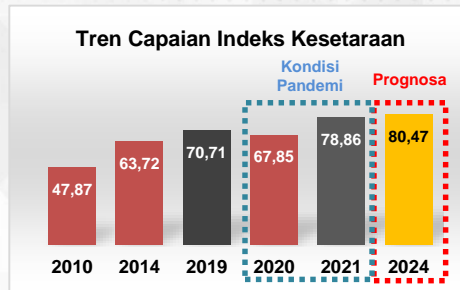
Ada kecenderungan meningkatnya persentase masyarakat yang takut bicara politik (Mujani & Liddle, 2021 - *Journal of Democracy*)

Indeks Demokrasi EIU

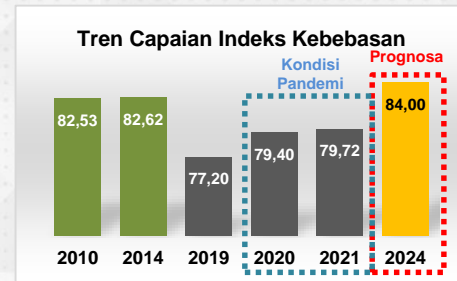


Tren demokrasi Indonesia mencapai poin terendah pada tahun 2020 – *Economist Intelligence Unit*

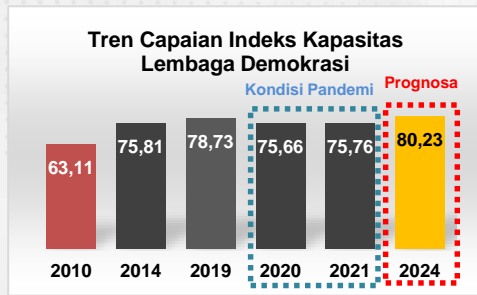
- Indikator Kinerja Pembangunan Politik dan Demokrasi Tahun 2005-2025



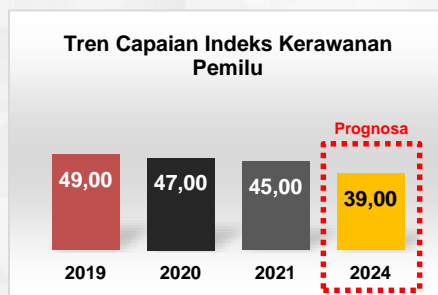
Tren pemenuhan hak politik meningkat, namun perlu dibarengi dengan peningkatan kedewasaan dalam berpolitik



Capaian indeks kebebasan mengalami fluktuasi yang mengindikasikan kebebasan sipil yang belum terjamin sepenuhnya



Capaian indeks kapasitas lembaga demokrasi mengalami tren meningkat, namun peran parlemen dan parpol masih belum optimal



Meski berada pada kategori sedang, IKP pada tahun 2021 belum menunjukkan penurunan signifikan yang disebabkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pemilu

Tantangan

- Hambatan dalam menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat untuk mandiri (otonom);
- Jaminan kesetaraan memperoleh atau mengakses sumber daya dan menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas;
- Kapasitas lembaga demokrasi untuk memastikan dan menjamin kesetaraan dan kebebasan (*responsive*).

Struktur & Sistem Politik

- Penguatan lembaga demokrasi
- Perbaikan sistem pemilihan dan kepartaian untuk memperkuat sistem presidensial
- Penguatan masyarakat sipil yang berkelanjutan
- Penjaminan kesetaraan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi
- Mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi dan mampu mendorong masyarakat untuk produktif dan inovatif

Budaya Politik

- Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- Penguatan ketahanan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional
- Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- Pengarus-utamaan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional

Demokrasi Digital

- Mengurangi Kesenjangan Digital
- Penciptaan ekosistem informasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat
- Penguatan ekosistem Pers dan Penyiaran digital
- Penciptaan Ruang-Ruang Partisipasi Publik yang aman, inklusif dan efektif berbasis digital



DARI DEMOKRASI PROSEDURAL MENUJU DEMOKRASI IDEAL (SUBSTANSIAL)

Menjaga dan memperbaiki kualitas demokrasi prosedural untuk menaikkan derajat demokrasi Indonesia dari prosedural menuju substansial

DEMOKRASI PROSEDURAL



**Memperkuat
Masyarakat Sipil**



**Mewujudkan
Kesetaraan**

DEMOKRASI IDEAL (SUBSTANSIAL)



- Partisipasi
- Kontestasi
- Deliberasi
- Kemitraan

Bahan paparan dapat diakses melalui

<https://link.bappenas.go.id/SeminarHasilBSPolkom>

**Tanggapan dan masukan untuk Background Study RPJPN 2025-2045
dan RPJMN 2025-2029 dapat dikirimkan melalui e-mail pada**

ditpolkom@bappenas.go.id

TERIMA KASIH

